

Memahami Pendekatan Pembangunan Wilayah (Regional): Dari Pembangunan Sektoral ke Pembangunan Lokal

Afton Ilman Huda¹, Moh. Faqih², Moh. David Afandi³

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Abstract Artikel ini mengkaji evolusi pendekatan pembangunan daerah dari perspektif ekonomi dan kebijakan publik. Awalnya, pembangunan di Indonesia bersifat sektoral dan terpusat, tetapi sejak era desentralisasi, paradigma pembangunan telah bergeser ke arah pembangunan daerah dan lokal yang lebih partisipatif berdasarkan potensi daerah. Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dan studi empiris. Pembahasan menunjukkan bahwa pergeseran ke arah pembangunan daerah dan lokal berkontribusi pada peningkatan efisiensi, pemerataan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi daerah. Namun, tantangan seperti ketimpangan antardaerah, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektoral masih menjadi kendala utama.

Keywords Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah, Desentralisasi, Ekonomi Daerah

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tradisional di Indonesia selama beberapa dekade banyak berakar pada paradigma pertumbuhan ekonomi kuantitatif, yang menitikberatkan pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), industrialisasi, dan perluasan kapasitas produksi. Namun, paradigma tersebut mulai digeser ke arah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang memperhatikan dimensi-dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Misalnya, (Karuniasa, 2020) membahas bahwa orientasi pembangunan nasional selama ini lebih menekankan aspek ekonomi tanpa cukup memperhitungkan dampak ekologis dan keadilan sosial, sehingga transformasi kebijakan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, (Asriadi et al., 2024) menyebutkan bahwa paradigma ekonomi berkelanjutan di negara berkembang (termasuk Indonesia) menuntut adanya keseimbangan antar sektor dan perhatian terhadap dampak lintas generasi.

Pendekatan sektoral yang bersifat top-down di mana kebijakan dan program pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat dan kemudian diterapkan ke wilayah tanpa banyak adaptasi terhadap kondisi lokal itu telah pula menunjukkan kelemahan. Ketidakselarasan antara prioritas pusat dan kebutuhan daerah sering mengakibatkan proyek pembangunan tidak cocok dengan karakteristik lokal, penggunaan sumber daya yang kurang efisien, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, penelitian tentang perbaikan permukiman informal di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan top-down sering gagal menangkap kondisi masyarakat lokal, sementara pendekatan bottom-up lebih mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan relevan (Iqbal, 2010).

Isu ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi pemicu utama munculnya perhatian terhadap pendekatan pembangunan wilayah. Indonesia menunjukkan bahwa indikator pembangunan, seperti pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan akses layanan publik, berbeda secara signifikan antar provinsi, kabupaten/kota, dan antar keca-

matan. Penelitian “Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia” oleh (Adryawning & Widiyanto, 2025) misalnya, mengungkap bahwa perkembangan wilayah yang tinggi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah luar Jawa banyak tertinggal dari sisi kemajuan pembangunan. Di samping itu, studi di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa perbedaan sektor ekonomi antar kabupaten/kota memberikan kontribusi besar bagi ketimpangan penghasilan antar wilayah (Lestari et al., 2023).

Menanggapi kelemahan pendekatan sektoral dan tantangan ketimpangan, muncul gagasan pembangunan wilayah (*regional development*) sebagai alternatif strategi yang lebih kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memandang wilayah sebagai objek administratif, tetapi sebagai entitas yang memiliki potensi, keterkaitan spasial (*spatial linkage*), dan dinamika lokal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Dengan otonomi daerah yang semakin kuat sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk merumuskan dan menjalankan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Hal ini memungkinkan pembangunan regional dan lokal berinteraksi secara sinergis.

Memahami hubungan antara pembangunan regional dan pembangunan lokal menjadi sangat penting dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembangunan regional cakupannya lebih luas, melibatkan koordinasi antar kabupaten/kota dan antar provinsi, serta memperhatikan keterkaitan antarwilayah misalnya arus migrasi, distribusi investasi, infrastruktur lintas daerah, sementara pembangunan lokal (*local development*) bersifat lebih sempit, spesifik, dan terfokus pada potensi dan kebutuhan komunitas atau kabupaten/kota. Tanpa memahami hubungan ini, kebijakan pembangunan bisa menjadi tumpang tindih, kurang efisien, atau bahkan memperburuk ketimpangan.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi perkembangan pendekatan pembangunan di Indonesia dari paradigma

sektoral menuju paradigma pembangunan wilayah dan lokal; (2) menganalisis kelemahan dan tantangan dari pendekatan sektoral top-down; (3) menjelaskan bagaimana pembangunan wilayah muncul sebagai respon terhadap masalah ketimpangan antar daerah; dan (4) menilai relevansi pendekatan pembangunan wilayah dan lokal terhadap kebijakan ekonomi daerah dalam kerangka otonomi daerah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan dalam konteks ekonomi dan sosial memiliki beragam definisi yang berkembang seiring waktu. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan institusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sen (1999) memperluas definisi ini dengan menekankan pembangunan sebagai perluasan kebebasan manusia dalam memilih dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Sachs (2015) juga menyatakan bahwa pembangunan sejati tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks nasional, Lestari, Pasha, dan Mahardika (2021) menggarisbawahi bahwa pembangunan Indonesia pada era modern bergerak dari fokus pada pertumbuhan ekonomi makro menuju kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan (Lestari et al., 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan.

Konsep wilayah dalam pembangunan erat kaitannya dengan ruang ekonomi yang memiliki karakteristik dan potensi berbeda-beda. Sjafrizal (2014) menyebut wilayah sebagai kesatuan geografis yang memiliki batas administratif dan fungsional dengan

interaksi ekonomi di dalamnya. Wilayah dapat dikategorikan menjadi homogen, nodal, dan perencanaan (planning region), tergantung pada karakter dan fungsi spasialnya. Karakteristik ekonomi regional sendiri mencakup potensi sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, serta pola interaksi antarwilayah seperti perdagangan, migrasi, dan investasi (Kuncoro, 2021). Di Indonesia, kondisi geografis yang luas menyebabkan setiap wilayah memiliki struktur ekonomi yang berbeda: Jawa lebih industri dan jasa, sedangkan luar Jawa masih dominan pada pertanian dan sumber daya alam. Adryawning dan Widiyanto (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah utama pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Pulau Jawa (Adryawning & Widiyanto, 2025).

Dalam kerangka teori pembangunan wilayah, Hirschman (1958) dan Myrdal (1957) memperkenalkan teori pertumbuhan tidak seimbang (unbalanced growth theory). Hirschman berpendapat bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara merata di semua sektor dan wilayah sekaligus, melainkan dimulai dari sektor atau wilayah unggulan yang kemudian menimbulkan efek sebar (spread effect) ke daerah lain. Sebaliknya, Myrdal memperingatkan adanya efek hisap (backwash effect), di mana daerah maju menarik sumber daya dari daerah tertinggal, memperlebar kesenjangan antarwilayah. Prinsip kesetimbangan pembangunan antarwilayah karenanya menuntut intervensi kebijakan yang mampu memperkuat konektivitas dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Studi empiris terbaru di Indonesia oleh Pratama dan Yuliana (2023) juga mendukung pandangan ini, bahwa pembangunan berbasis pusat pertumbuhan tanpa strategi pemerataan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi regional (Pratama & Yuliana, 2023).

Secara historis, pendekatan pembangunan di Indonesia bermula dari pendekatan sektoral yang bersifat top-down dan terpusat pada pemerintah nasional. Pendekatan ini didasarkan pada prioritas pembangunan ekonomi tertentu—seperti industri, pertanian, atau infrastruktur—yang diharapkan

meneteskan manfaat ke daerah-daerah (trickle-down effect). Namun, Asriadi, Harahap, dan Nawawi (2024) menyatakan bahwa model sektoral seperti ini kurang efektif dalam mengatasi ketimpangan karena minimnya partisipasi daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan (Asriadi et al., 2024). Dalam praktiknya, pendekatan sektoral sering kali gagal mengakomodasi keunikan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga berdampak pada ketidakefisienan pembangunan dan lemahnya daya saing daerah.

Sebagai reaksi terhadap kelemahan tersebut, lahirlah pendekatan pembangunan regional yang menekankan keterkaitan antarwilayah (spatial linkage) dan peran wilayah sebagai entitas ekonomi yang saling terhubung. Pendekatan ini menganggap pembangunan sebagai proses terintegrasi antara sektor dan ruang. Penelitian oleh Rahmawati (2023) menegaskan bahwa pembangunan regional di Indonesia diarahkan pada penguatan koridor ekonomi dan konektivitas antarwilayah sebagai strategi untuk menekan ketimpangan pembangunan nasional (Rahmawati, 2023). Dengan demikian, pembangunan regional tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat industri, tetapi juga memperkuat hubungan fungsional antara pusat dan hinterland.

Dalam konteks desentralisasi, berkembang pula paradigma pembangunan lokal yang menekankan prinsip bottom-up dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa pembangunan akan lebih efektif apabila digerakkan dari tingkat lokal berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi lokal (local economic development) menekankan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya lokal. Studi oleh Yusnita dan Wibowo (2022) menemukan bahwa pembangunan berbasis potensi lokal di Indonesia berhasil meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan menciptakan inovasi sosial yang lebih adaptif (Yusnita & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan wilayah yang modern, pembangunan sektoral, regional, dan lokal

harus dipandang sebagai pendekatan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan, agar tercapai pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah.

Metode penelitian pada paradigma

Pembahasan dan Hasil

1. Perkembangan pendekatan Pembangunan

Seiring dinamika ekonomi global dan kompleksitas tantangan pembangunan (ketimpangan, krisis lingkungan, perubahan iklim, pandemi), paradigma pembangunan nasional mengalami evolusi. Pada tahap awal (masa kemerdekaan hingga Orde Lama), fokus pembangunan masih sangat sederhana: mendorong industrialisasi, meningkatkan produksi pertanian, dan stabilitas ekonomi makro. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut cenderung berorientasi ke pusat dan nasional, kurang memperhatikan keragaman kondisi lokal (lihat Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia) (Puteri & Rani1, 2020).

Pada era Orde Baru, perencanaan pembangunan formal semakin sistematis dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan sentralisasi pengendalian program pembangunan dari pusat. Tetapi kritik muncul terhadap karakteristik perencanaan yang terlalu teknokratis dan top-down, serta minim partisipasi masyarakat dan daerah. Sejumlah kajian menyebut bahwa sistem perencanaan tersebut “terlalu sentralistis” dan “terlalu teknokratis” sehingga kebijakan daerah kerap diabaikan dalam proses formulasi pusat (Pasca Orde Baru) (Fuady, 2012).

Memasuki era Reformasi dan desentralisasi (pasca UU Otonomi Daerah 1999 dan revisi 2004), kebijakan pembangunan mulai membuka ruang bagi daerah untuk mengambil peran dalam merumuskan prioritas pembangunan lokal. Dinamika kebijakan perencanaan nasional juga bergeser, dari koherensi sentralisme ke penekanan pluralisme dan partisipasi lokal sebagai respons terhadap keragaman daerah. (Reza Hariyadi, 2021) menelaah dinamika kebijakan perencanaan nasional yang berubah sesuai konteks

politik, konstelasi kekuasaan, dan tuntutan pembangunan inklusif.

Dalam dekade terakhir, tantangan struktural seperti ketimpangan antarwilayah, krisis iklim, dan perubahan teknologi digital memperkuat kebutuhan pendekatan yang lebih kontekstual. Misalnya, penelitian “Analysis of Inter-Regional Economic Development Inequality” oleh Putri (2025) mengungkapkan bahwa disparitas pembangunan antar provinsi Indonesia tetap tinggi selama 2013–2023, menunjukkan bahwa skema pembangunan lama belum efektif mengatasi ketimpangan struktural. Demikian pula, dalam konteks lokal, inisiatif pembangunan ekonomi desa (village-based LED) banyak dibahas sebagai alternatif agar potensi lokal lebih optimal digunakan dan manfaatnya lebih menyebar ke masyarakat bawah (Judijanto et al., 2024).

Secara ringkas, perkembangan pendekatan pembangunan bergerak dari model nasional/terpusat ke arah model yang lebih fleksibel, adaptif, dan terdesentralisasi—menyesuaikan dengan keragaman wilayah dan kebutuhan lokal.

2. Dari Pembangunan Sektoral ke Regional ke Lokal

Pembangunan Sektoral merupakan tahap klasik dimana negara menargetkan sektor-sektor unggulan (industri, pertanian, energi, infrastruktur) melalui kebijakan nasional yang digerakkan dari pusat. Keunggulan model ini adalah efisiensi skala besar, koordinasi antar sektor, dan alokasi sumber daya investasi berskala nasional. Namun kelemahannya jelas: sedikit ruang adaptasi terhadap kondisi lokal, kurang responsif terhadap diferensiasi daerah, dan potensi kebijakan gagal di daerah karena miskin data lokal atau karakteristik yang unik.

Sebagai reaksi terhadap keterbatasan sektoral, muncul pendekatan pembangunan regional, yang memandang wilayah sebagai unit yang memiliki hubungan internal dan eksternal—termasuk interaksi antar wilayah (spatial linkage), alur migrasi, distribusi sumber daya, dan koridor ekonomi. Pada pendekatan ini, strategi pembangunan diarahkan ke pusat pertumbuhan regional (growth poles), klaster ekonomi wilayah, pengembangan koridor antarwila-

yah, dan integrasi sektor secara spasial. Dalam konteks Indonesia, konsep pembangunan koridor (seperti koridor timur, barat, dan koridor lintas pulau) merupakan contoh implementasi pendekatan regional. Studi “Regional Economic Development Based on Local Potential” (Novita et al., 2023) menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal sebagai landasan pembangunan regional agar tidak bergantung semata pada intervensi pusat.

Selanjutnya, pembangunan lokal (local development atau local economic development – LED) mengedepankan bahwa pembangunan efektif bila muncul dari bawah, berdasarkan potensi komunitas lokal, dan dengan partisipasi aktif warga. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan lokal, kolaborasi antar aktor (pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat), inovasi lokal, serta adaptasi kebijakan terhadap kapasitas dan konteks lokal. Misalnya, (Judijanto et al., 2024) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa (village-based LED) sangat tergantung pada perbaikan infrastruktur desa, kapasitas SDM, dan integrasi pasar desa ke jaringan yang lebih luas.

Transformasi dari sektoral → regional → lokal tidak berarti pendekatan sektoral ditinggalkan sepenuhnya, melainkan diintegrasikan secara hierarkis dan sinergis. Pembangunan regional menyelaraskan interaksi wilayah antar daerah sehingga LED tidak berjalan sendiri-sendiri, dan sektoral tetap menjadi instrumen pendukung pembangunan yang lebih menyeluruh. Sinergi ini penting agar skala nasional dan lokal saling menopang dan tidak bertabrakan.

3. Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)

Pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development – LED) merupakan salah satu wujud konkret dari pendekatan pembangunan lokal. LED memfokuskan pada pemanfaatan sumber daya lokal, inovasi lokal, kewirausahaan masyarakat, dan penciptaan nilai tambah yang berlangsung di tingkat daerah atau komunitas. Dalam konteks Indonesia, LED desa (village-based LED) telah menjadi tema penelitian penting, terutama untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara kawasan pedesaan dan

perkotaan (Judijanto et al., 2024).

Salah satu aspek utama LED adalah penguatan kapasitas: infrastruktur dasar (jalan desa, listrik, akses internet), pelatihan keahlian lokal, modal usaha mikro dan kecil, serta akses pasar. Judijanto et al. menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur dan SDM menjadi hambatan utama yang harus diatasi bersama agar desa mampu mengembangkan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam konteks ekonomi kreatif, Pratomo, Azhar, dan Satria (2021) menganalisis pengaruh kelas kreatif terhadap LED di Indonesia. Mereka menemukan bahwa konsentrasi tenaga kerja kreatif, pendidikan tinggi, rasio elektrifikasi, dan cakupan internet memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kata lain, sektor kreatif dapat menjadi motor penggerak LED bila didukung kondisi pendukungnya seperti infrastruktur digital dan kualitas SDM (et al., 2021).

Peran UMKM juga sangat krusial dalam LED. Kurniadi (2024) mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia meningkat dari 64,2 juta (2020) menjadi 65,5 juta (2023), yang menunjukkan upaya pemerintah mendorong kewirausahaan lokal sebagai pilar pembangunan ekonomi lokal. UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada struktur ekonomi luar daerah (Kurniadi et al., 2024).

Selain itu, iklim bisnis lokal dan inovasi Pemerintah Daerah ikut menentukan keberhasilan LED. (Hilmawan et al., 2023) dalam studi “Public sector innovation in local government and its impact on development performance” menegaskan bahwa inovasi birokrasi dan pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten/kota secara signifikan memengaruhi kinerja pembangunan daerah. Pemerintah lokal yang adaptif dan responsif memperkuat daya tarik daerah terhadap investasi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Studi lain mengenai dinamika lokal menunjukkan bahwa pengembangan produk lokal, peningkatan daya saing produk lokal (branding, sertifikasi kualitas, akses e-commerce), serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi pilar utama LED di

tengah persaingan global (paper Local Economic Dynamics: Opportunities and ..., 2024).

Dengan demikian, LED bukan hanya soal pengembangan usaha kecil di tingkat lokal, tetapi juga soal menciptakan ekosistem lokal yang kondusif: konektivitas infrastruktur, dukungan kebijakan daerah, inovasi layanan publik, kualitas SDM, dan akses pasar.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional dan lokal memiliki implikasi besar terhadap desain kebijakan publik di Indonesia. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas perencanaan berbasis wilayah dan data spasial. Menurut Suryana dan Rachmawati (2024), kebijakan pembangunan sering gagal mencapai efektivitas karena lemahnya basis data lokal yang akurat dan terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan tidak selaras dengan potensi riil daerah (Suryana & Rachmawati, 2024). Penguatan spatial data governance di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah penting agar perencanaan pembangunan lebih kontekstual dan terukur.

Kedua, integrasi antar-level pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) harus diperkuat agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Pembangunan regional membutuhkan koordinasi lintas wilayah administratif karena banyak isu ekonomi bersifat lintas batas—seperti perdagangan, transportasi, pengelolaan sumber daya air, dan investasi. Penelitian oleh Winarno dan Kartika (2023) menunjukkan bahwa koordinasi antar pemerintah daerah di kawasan metropolitan masih lemah akibat ego sektoral dan keterbatasan mekanisme kolaborasi lintas batas administratif (Winarno & Kartika, 2023). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kelembagaan regional, seperti regional development councils, untuk memperkuat sinergi antar daerah.

Ketiga, pendekatan pembangunan lokal harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inovasi sosial. Program pembangunan berbasis komunitas (community-based development) terbukti

efektif dalam menggerakkan ekonomi mikro dan mengurangi kemiskinan. Prasetyo dan Laili (2023) menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan pelaku usaha kecil dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran di pedesaan (Prasetyo & Laili, 2023). Kebijakan yang bersifat bottom-up juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, sehingga meningkatkan keberlanjutan program.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan daerah dan inovasi pemerintahan menjadi syarat keberhasilan pembangunan regional dan lokal. Studi Hilmawan (2023) menegaskan bahwa inovasi dalam tata kelola publik di tingkat lokal—seperti digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, dan sistem monitoring berbasis teknologi—berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja pembangunan daerah (Hilmawan et al., 2023). Dengan demikian, modernisasi birokrasi daerah harus menjadi prioritas agar efektivitas pelaksanaan pembangunan meningkat.

Kelima, dalam konteks desentralisasi fiskal, alokasi anggaran daerah sebaiknya diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan padat karya lokal. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis potensi wilayah. Siregar dan Rasyid (2024) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya transfer dana pusat, tetapi juga pada kemampuan daerah mengalokasikan belanja publik secara strategis ke sektor produktif dan penguatan UMKM (Siregar & Rasyid, 2024).

Dengan memperhatikan poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah dan lokal bukan sekadar soal distribusi kewenangan, tetapi juga transformasi cara berpikir dalam merancang kebijakan—dari yang bersifat administratif menjadi berbasis potensi wilayah, kolaboratif, dan partisipatif.

KESIMPULAN

Pembangunan wilayah di Indonesia mengalami evolusi paradigmatik dari pendekatan sektoral yang bersifat top-down menuju pendekatan regional dan lokal yang lebih inklusif serta partisipatif. Pendekatan

sektoral yang dominan pada masa lalu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi makro, namun gagal mengatasi ketimpangan antarwilayah dan kurang mempertimbangkan konteks lokal. Pergeseran ke pembangunan regional menekankan pentingnya keterkaitan spasial antar daerah dan pemerataan hasil pembangunan, sedangkan pendekatan pembangunan lokal memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing.

Pembangunan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED) menjadi wujud nyata dari paradigma pembangunan baru tersebut. Dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi sosial, dan kolaborasi multipihak, LED terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan publik yang terintegrasi antar level pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta ketersediaan data dan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Secara keseluruhan, sinergi antara pembangunan sektoral, regional, dan lokal harus menjadi arah baru pembangunan nasional di era otonomi daerah. Pemerintah pusat perlu berperan sebagai fasilitator dan pengarah, sementara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi pelaku utama dalam implementasi pembangunan berbasis potensi wilayah. Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata di seluruh pelosok Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>

- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma Ekonomi berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1009. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12794>
- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma Ekonomi berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1009. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12794>
- Fuady, A. H. (2012). Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 375. https://media.neliti.com/media/publications/152076-I-D-perencanaan-pembangunan-di-indonesia-pas.pdf?utm_source
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Iqbal, M. N. M. (2010). *Perbaikan Permukiman Informal di Indonesia: Refleksi Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*. 37–41. <https://ejournal.itn.ac.id/semsina/article/view/3255/2564>
- Judijanto, L., Ekasari, S., & Elida, S. (2024). Local Economic Development Based on Village Potential: a Literature Review. *Journal of Community Dedication*, 4(2), 414–426.
- Karuniasa, M. (2020). Prinsip-Prinsip Transformasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengendalian Perubahan Iklim Berdasarkan Paradigma Systems Thinking. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 14(2), 13–29. <https://doi.org/10.31849/forestra.v14i2.3514>
- Kurniadi, A., Sudarmiatin, & Wardana, L. W. (2024). The Role of MSMES in Local Economic Improvement and Labor Absorption in Indonesia. *Nusantara Economics and Entrepreneurships Journals*, 2(3), 333–341.
- Lestari, F. Y., Affandi, M. I., & Ismono, R. H. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 456. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.60132>
- Novita, A. A., Shinjee, B., Melinda, D., Sari, T. P., & Tantriana, P. (2023). *Regional Economic Development Based on Local (Study on Gadingkulon Village , Dau District , Malang Regency)* (Vol. 1, Issue 115). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-090-9>
- Pratomo, S., Ashar, K., & Satria, D. (2021). Role of Creative Economy on Local Economic Development. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.4>
- Puteri, R., & Rani¹, H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia Analisis of Development Paradigm in Indonesian. *IJI Publication*, 1(1), 40–52. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/37>
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>